



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA
BEKASI
TAHUN 2025-2029**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA atas penyelesaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJMD salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terhadap Konsekuensi logis bagi setiap Aparatur Pemerintah, di dalam kelembagaan senantiasa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Penyusunan Renstra ini merupakan manifestasi komitmen Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kinerja. Dengan Renstra ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Kota Bekasi, serta selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahunan dengan memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal instansi Pemerintah guna menetapkan arahan pengembangan/ perjalanan suatu instansi Pemerintahan, tahapan serta strategis ini kami sadari masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian kiranya dapat dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menetapkan skala priritas program/ kegiatan guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas suatu program/ kegiatan terutama di bidang Administrasi Umum pemerintahan.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) yang jelas dan sinergis, diharapkan dimasa mendatang Sekretariat DPRD Kota Bekasi dapat lebih maju mengantisifasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

Bekasi, 26 Agustus 2025

Sekretaris DPRD Kota Bekasi



Lia Erliani, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19750606 199311

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	16
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
3.1 Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029	50
3.2 Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029	60
3.3 Strategi Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	64
3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029	66

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
4.1 Program.....	69
4.2 Kegiatan	70
4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.....	74
4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah	103
4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	107
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	110
BAB V PENUTUP	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2020-2024	29
Tabel 2. 2 Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020-2024	35
Tabel 2. 3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	49
Tabel 3. 1 Tujuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi	59
Tabel 3. 2 Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	60
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	61
Tabel 3. 4 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi	66
Tabel 3. 5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	67
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	76
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	89
Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	104
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD	109
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD	50
Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	51
Gambar 3. 3 Visi Kabinet Merah Putih	52
Gambar 3. 4 8 (delapan) Misi Utama Asta Cita	53
Gambar 3. 5 Visi Kota Bekasi.....	56
Gambar 3. 6 Misi Kota Bekasi	57
Gambar 3. 7 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi	58
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat efisien dan efektif, maka pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, proses perencanaan anggaran daerah, proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, proses pertanggungjawaban keuangan daerah, proses pengawasan

keuangan daerah; dan proses analisis informasi pemerintahan daerah lainnya. Selain itu di tanggal 27 Maret 2025 telah ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) agar selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah secara serentak.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, akuntabel, responsible, serta reliable sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Selain itu Review Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Di dalamnya memuat penjabaran visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 dituangkan ke dalam kebijakan, strategi, dan program perencanaan pembangunan mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota dalam bentuk Sekretariat DPRD.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi disusun atas dasar untuk mengantisipasi keadaan dan prediksi-prediksi yang akan terjadi serta adanya perubahan RPJMD Perubahan 2025-2029 yang mengakibatkan indikator kinerja utama Sekretariat DPRD yang semula adalah (1) Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD; (2) Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi (1) Nilai AKIP Sekretariat DPRD; (2) Terfasilitasinya pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N; (3) Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N; dan (4) Terfasilitasinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Renstra merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi periode 2025-2029 menyajikan agenda utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2024-2026 yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini.

Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Berkaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan/ dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bekasi.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 16A Seri E);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 21 Seri E)
23. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 9 Seri E);

25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 100 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya dokumen RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *Good and Clean Governance*.

Disamping itu Renstra ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam pencapaian Tujuan, Sasaran dan Program serta indikatornya sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dalam rangka mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra ini antara lain sebagai berikut:

1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang

merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
4. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
5. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah untuk menjamin kesinambungan antara RPJMNN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasi yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Oleh sebab itu dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, *logic model*, berfikir system, dan sistem dinamik.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 memuat visi dan misi Wali Kota - Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
4. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis

deskriptif dan analisis diagnostik.

2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).
3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar (menarasikan kesimpulan data).
4. Memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah;
 - d. Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - e. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (jikalau ada);
 - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (jikalau ada); dan
 - g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (jikalau ada).
5. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan KLHS RPJMS 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian Pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa

- permasalahan yang bersifat dominan.
6. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
 7. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
 8. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
 - a. permasalahan;
 - b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
 - c. potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:
 - a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan

kewenangannya; dan

- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra Perangkat Daerah cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
3. Jika Perangkat Daerah mampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra Perangkat Daerah direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarnya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah disusun dengan:
 - a. kalimat kondisi;
 - b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
 - d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta merupakan *intermediate outcome*.
5. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan pentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
6. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah .
7. Penyajian lokus Renstra Perangkat Daerah untuk

kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

8. Arah kebijakan Restra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
2. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.
4. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
5. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

6. IKU dan IKK berlaku dari Tahun 2025 dan Tahun 2030. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah .

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel, keberadaan Sekretariat DPRD sebagai Perangkat Daerah yang memberikan dukungan teknis dan administratif kepada DPRD memiliki peranan yang sangat penting. Sekretariat DPRD Kota Bekasi berfungsi sebagai unsur pelayanan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, baik dalam bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, penting untuk memahami kondisi objektif Perangkat Daerah , termasuk pelayanan, permasalahan yang dihadapi, serta isu strategis yang perlu mendapat perhatian ke depan.

Gambaran umum pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD menjadi dasar untuk merumuskan arah kebijakan strategis lima tahunan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan. Gambaran ini mencakup identifikasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi), struktur organisasi, ketersediaan sumber daya, capaian kinerja pelayanan, serta kelompok sasaran yang dilayani. Melalui pemetaan tersebut, diharapkan Sekretariat DPRD mampu memperkuat kapabilitas internal sekaligus meningkatkan kualitas dukungan terhadap kerja kelembagaan DPRD secara menyeluruh.

Selain itu, identifikasi terhadap permasalahan aktual dan potensial menjadi krusial dalam upaya mendorong transformasi pelayanan publik yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Berbagai tantangan seperti kebutuhan digitalisasi proses administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas publik, menjadi bagian dari isu-isu penting yang perlu diakomodasi dalam Renstra ini.

Dengan demikian, Bab II ini akan menyajikan uraian menyeluruh mengenai gambaran pelayanan, permasalahan aktual, dan isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perencanaan strategis yang disusun tidak hanya responsif terhadap kondisi eksisting, tetapi juga antisipatif terhadap perubahan dan kebutuhan masa depan.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

1. Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD Kota Bekasi bertugas menyelenggarakan dukungan administratif dan operasional bagi pelaksanaan fungsi DPRD, yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dukungan ini mencakup penyediaan data dan informasi, fasilitasi rapat dan kegiatan kedewanan, serta pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari satu Sekretaris DPRD yang membawahi beberapa bagian dan subbagian, antara lain Bagian Umum, yang membawahkan Sub Bagian

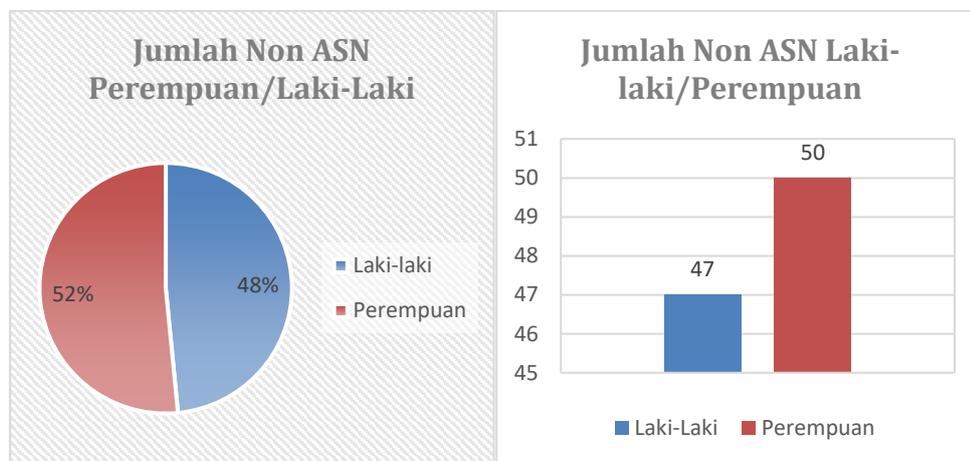
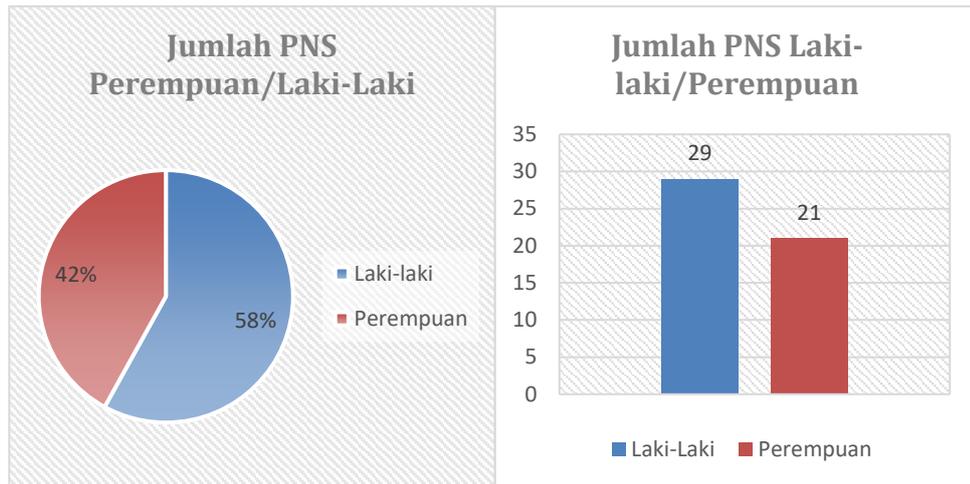
Tata Usaha dan Kepegawaian serta Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

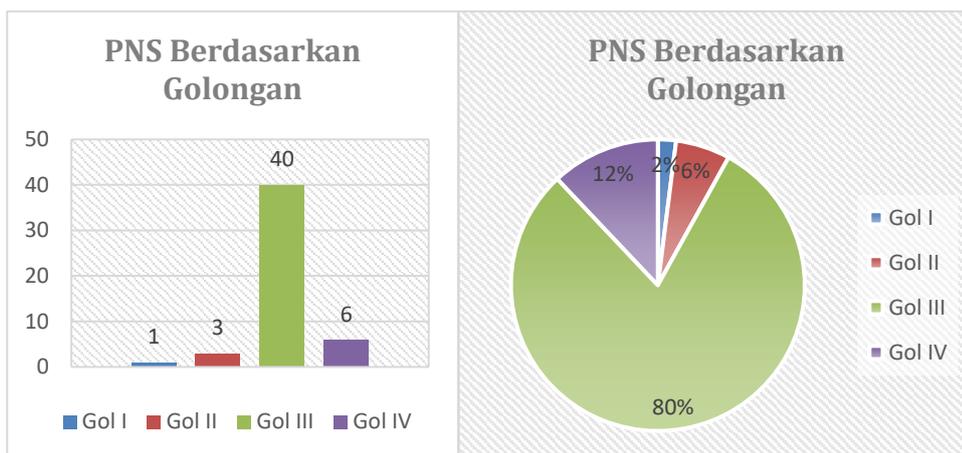
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kota Bekasi didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi di bidang administrasi pemerintahan, hukum, keuangan, serta kehumasan. Kualitas dan kapasitas SDM menjadi aspek penting dalam menjamin profesionalisme pelayanan kepada DPRD.

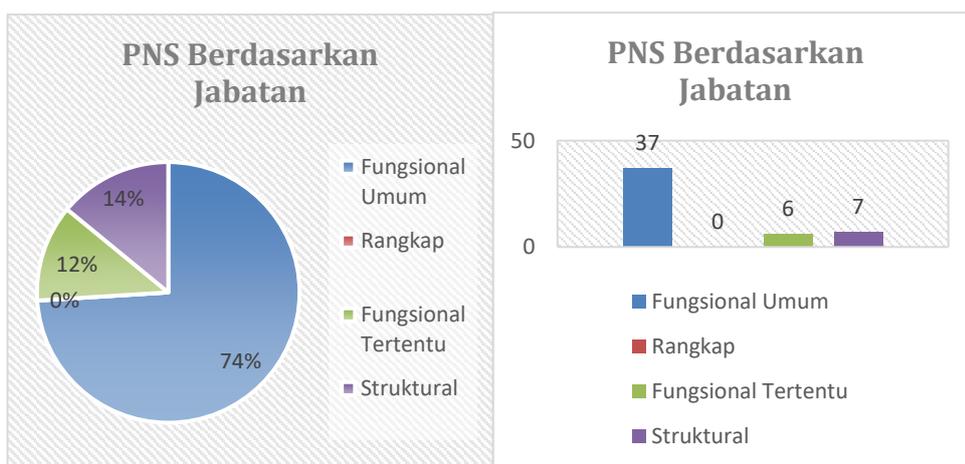
Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD secara administratif dan teknis. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah sebanyak 50 orang, yang terdiri dari 29 orang laki-laki (58%) dan 21 orang perempuan (42%). Komposisi ini menunjukkan adanya representasi gender yang cukup proporsional, meskipun keterlibatan perempuan dalam jabatan struktural masih dapat ditingkatkan.



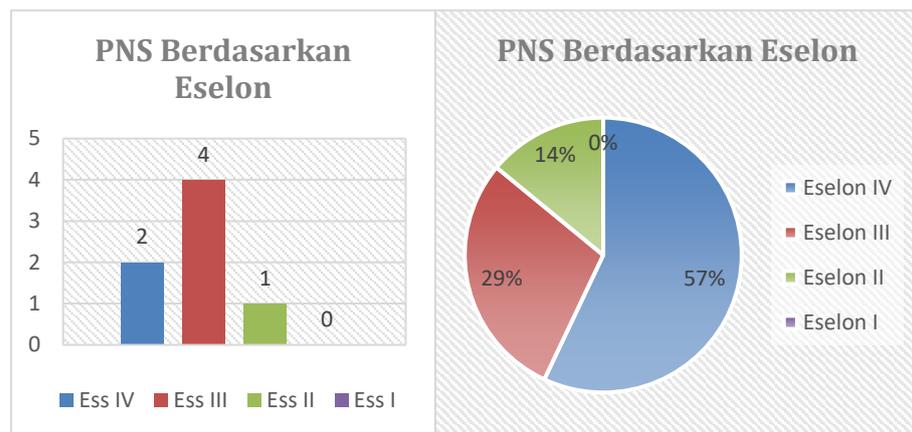
Dilihat dari klasifikasi berdasarkan golongan, sebagian besar PNS berada pada Golongan III sebanyak 40 orang (80%), disusul Golongan IV sebanyak 6 orang (12%), Golongan II sebanyak 3 orang (6%), dan Golongan I sebanyak 1 orang (2%). Komposisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jenjang menengah ke atas, yang menunjukkan tingkat kematangan karier dan pengalaman yang cukup baik untuk mendukung tugas-tugas kedewanan.



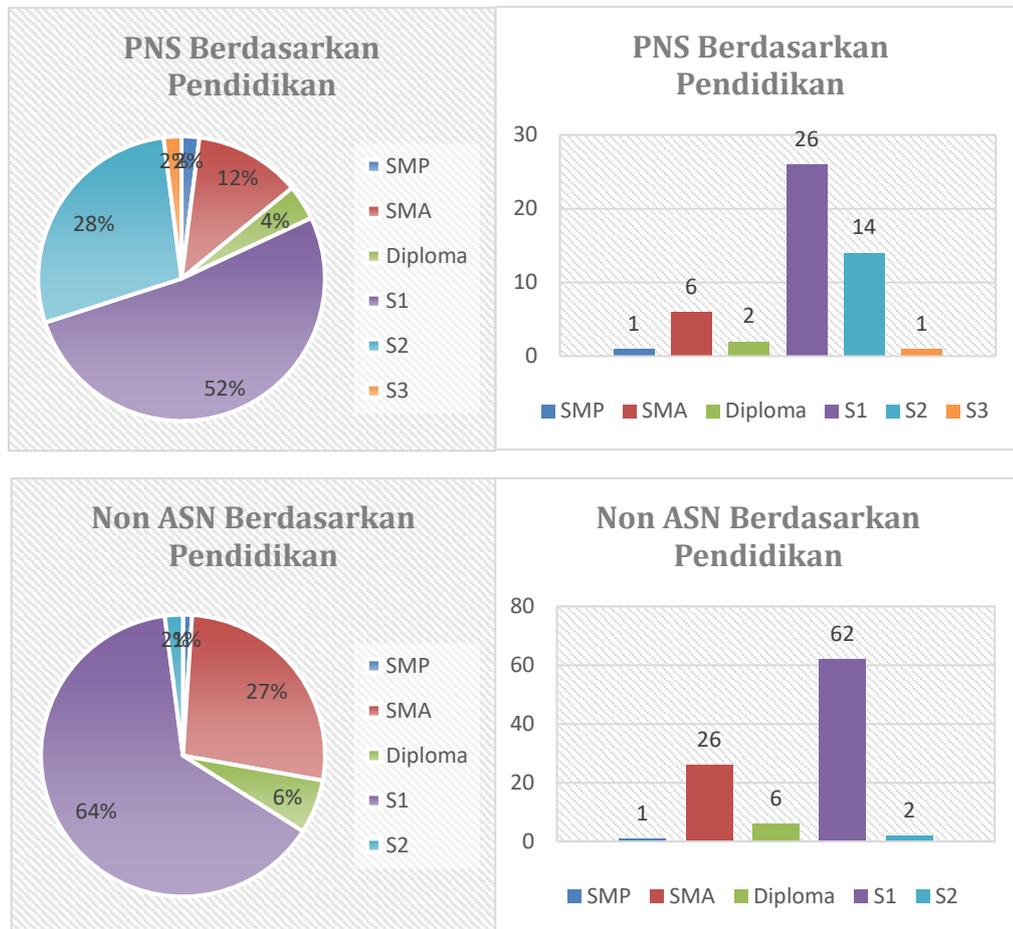
Dalam hal jenis jabatan, sebanyak 37 orang (74%) pegawai menduduki jabatan fungsional umum, sementara 6 orang (12%) menduduki jabatan fungsional tertentu, dan 7 orang (14%) menduduki jabatan struktural. Tidak terdapat pegawai dengan jabatan rangkap. Dominasi jabatan fungsional umum menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berperan sebagai pelaksana administratif, sementara keberadaan jabatan struktural dan fungsional tertentu masih terbatas, yang dapat menjadi perhatian dalam upaya pengembangan SDM ke depan.



Berdasarkan struktur eselonisasi, dari total pegawai yang menduduki jabatan struktural, terdapat 2 orang (57%) pada Eselon IV, 4 orang (29%) pada Eselon III, dan 1 orang (14%) pada Eselon II. Tidak terdapat pegawai pada Eselon I. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan di Sekretariat DPRD masih relatif ramping, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang dijalankan.



Dari sisi kualifikasi pendidikan, mayoritas pegawai telah berpendidikan tinggi, yaitu sebanyak 26 orang (52%) berpendidikan Strata 1 (S1), 14 orang (28%) Strata 2 (S2), dan 1 orang (2%) Strata 3 (S3). Sementara itu, 6 orang (12%) berpendidikan SMA, 2 orang (4%) Diploma, dan 1 orang (2%) berpendidikan SMP. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi cukup memadai untuk mendukung profesionalisme kerja, meskipun penguatan pelatihan teknis dan pengembangan kapasitas tetap dibutuhkan secara berkelanjutan guna menjawab tantangan tugas-tugas kelembagaan DPRD yang semakin kompleks.



2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil dan dampak). Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan Tujuan dan Sasaran yang ditunjang oleh 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 59 (lima puluh Sembilan) sub kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SK Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SK Perangkat Daerah;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SK Perangkat Daerah.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak

- dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - h. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD;
 - i. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, dengan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
 - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan;

- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik;
 - 5) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD.
- b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan Sub Kegiatan:
- 1) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS;
 - 2) Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - 3) Sub Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran;
 - 4) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan;
 - 5) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester;
 - 6) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
- c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan Sub Kegiatan:
- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
 - 3) Sub Kegiatan Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
 - 4) Sub Kegiatan Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;

- 5) Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 6) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran;
 - 7) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan Sub Kegiatan:
- 1) Sub Kegiatan Orientasi DPRD;
 - 2) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD;
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
 - 6) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD.
- e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan Sub Kegiatan:
- 1) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD;
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.
- f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD.

g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD,
dengan Sub Kegiatan:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD;
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.

Tabel 2. 1
TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI
TAHUN 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasasaran Tahun ke-					Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	76.71					76.98					100.35				
			Meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	50	75	75,1	75,2		100	87, 51	75	80		200	116, 68	99, 86	106, 38	
			Meningkatnya Profesionalisme Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (Anggota Dewan)	76.71					84.71					110.43				
				Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu		75	75,1	75,2			100	75,1	100			133, 33	100	132, 98	
				Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu		75	75,1	75,2			100	75,1	100			133, 33	100	132, 98	
				Nilai AKIP Perangkat Daerah		77,4	77,5	77,6			69, 56	70, 08	63, 38			89, 87	90, 42	81, 67	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-					Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu					75,3					60,87					80,84
				Prosentase pengesahan anggaran tepat waktu					75,3					100					132,80
				Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu					75,3					100					132,80
			Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah					77,7					69,62					89,60

Analisis Deskriptif

Tujuan 1:

Meningkatkan Pengelolaan Administrasi dan Fasilitasi Kegiatan DPRD Secara Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Tujuan:

Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD dan peningkatan kualitas layanan.

Realisasi Kinerja:

Capaian pada tahun 2020 adalah 76.71 dan terus meningkat pada tahun 2021 (76.98) hingga 2024 (100.35). Ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas layanan.

Harmonisasi Kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif: Prosentase raperda yang disahkan tepat waktu mencapai 100% pada tahun 2020, menurun menjadi 87,51% pada 2021, tetapi meningkat kembali ke 116,68% pada 2024. Secara keseluruhan, rasio capaian menunjukkan bahwa sekretariat mampu mendukung pengesahan perda dengan baik dan terus membaik sepanjang periode tersebut.

Profesionalisme Sekretariat DPRD: Indeks Kepuasan Anggota Dewan meningkat dari 76.71 pada 2020 menjadi 110.43 pada 2024, yang mencerminkan profesionalisme yang semakin baik.

Pengesahan Anggaran dan Pembahasan LKPJ: Pengesahan anggaran dan pembahasan LKPJ tepat waktu memiliki rasio capaian yang sangat baik, dengan pencapaian lebih dari 100% pada tahun-tahun berikutnya.

Tujuan 2:

Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan

Indikator Tujuan:

Prosentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD dan peningkatan kualitas layanan serta akuntabilitas kinerja.

Realisasi Kinerja:

Rasio capaian untuk pengesahan perda, anggaran, dan pembahasan LKPJ berada di atas 100% di tahun-tahun berikutnya, menunjukkan bahwa sekretariat DPRD mampu memenuhi target waktu yang telah ditentukan.

Akuntabilitas Pemerintahan: Nilai AKIP Perangkat Daerah mengalami penurunan pada awal periode, namun ada perbaikan yang signifikan pada tahun 2024 dengan capaian 89,60.

Analisis Diagnostik**Peningkatan Kualitas Layanan dan Profesionalisme****Masalah:**

Meskipun ada peningkatan yang signifikan pada indikator indeks kepuasan, terutama di kalangan anggota dewan, ada penurunan yang cukup tajam dalam nilai AKIP Perangkat Daerah di tahun 2022 (63,38) dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya area yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan internal sekretariat DPRD untuk memastikan peningkatan yang konsisten.

Solusi:

Fokus pada perbaikan sistem manajemen kinerja dan pelatihan staf untuk meningkatkan nilai AKIP dan memastikan pengelolaan administrasi yang lebih efisien.

Keterlambatan Pengesahan Perda**Masalah:**

Meskipun banyak capaian lebih dari 100% pada beberapa indikator, pada 2021 dan 2022, ada penurunan dalam pengesahan raperda yang mencapai 87,51%. Ini menunjukkan adanya keterlambatan dalam beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Solusi: Pemantauan yang lebih ketat terhadap proses administrasi dan koordinasi yang lebih baik antara DPRD dan pihak eksekutif untuk memastikan bahwa pengesahan raperda dan anggaran bisa berjalan sesuai jadwal.

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**Masalah:**

Nilai AKIP mengalami penurunan di tahun 2022 dan belum pulih sepenuhnya pada 2023, meskipun pada 2024 ada peningkatan yang cukup signifikan.

Solusi:

Diperlukan evaluasi lebih mendalam terhadap sistem pelaporan dan pengawasan dalam Perangkat Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas.

Rekomendasi Umum

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif untuk mempercepat proses legislasi dan pengesahan anggaran.

Fokus pada perbaikan sistem pengelolaan administrasi internal untuk meningkatkan nilai AKIP Perangkat Daerah .

Memberikan perhatian lebih pada pengelolaan waktu dan manajemen sumber daya manusia agar capaian kinerja tetap konsisten tinggi sepanjang periode.

Tabel 2. 2
Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020-2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dara dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target												Realisasi												Capaian							
			2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024			
			F	K	F	K	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	F	K	F	K	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	F	K	F	K	FISIK	KEU ANG	FISIK	KEU ANG	FISIK	KEU ANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
I	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							178.921.516.306		184.951.581.620		209.165.099.233						134.567.940.364		152.358.854.438		158.937.476.332						75,21 %		82,38 %		75,99 %		
4.02.01	Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD						92.325.282.542		96.951.819.660		97.267.144.761						82.772.126.205		89.068.318.565		84.843.449.148						89,65 %		91,87 %		87,23 %		
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100%	507.500.000		100%	80.000.000		100%	80.000.000				100%	423.699.500		100%	27.606.900		100	20.187.300				83,49 %		34,51 %		25,23 %	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					25,00 Dok	500.000.000		25,00 Dok	40.000.000		12,00 Dok	40.000.000				25	423.699.500		25	14.083.500		12	11.150.400				84,74 %		35,21 %		27,88 %	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1,00 Lap	7.500.000		3,00 Lap	40.000.000		3,00 Lap	40.000.000				1	0		3	13.523.400		3	9.036.900				0,00 %		33,81 %		22,59 %	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100%	11.438.700.000		100%	10.538.262.000		100%	11.403.723.000				100%	10.644.937.773		100%	9.980.607.228		96,62	10.564.116.860				93,06 %		94,71 %		92,64 %	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					770,00 Org/bln	11.428.700.000		55,00 Org/bln	10.498.262.000		770,00 Org/bln	11.363.723.000				770	10.635.756.273		55	9.952.742.228		718	10.546.329.760				93,06 %		94,80 %		92,81 %	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2,00 Dok	10.000.000		1,00 Lap	40.000.000		2,00 Lap	40.000.000				2	9.181.500		1	27.865.000		2	17.787.100				91,82 %		69,66 %		44,47 %	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dara dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target												Realisasi												Capaian											
			2020			2021			2022			2023			2024			2020		2021		2022			2023			2024										
			F	K	Ang	F	K	Ang	FISIK	KEUANGAN	Ang	FISIK	KEUANGAN	Ang	FISIK	KEUANGAN	Ang	F	K	F	K	FISIK	KEU ANG	Ang	FISIK	KEU ANG	Ang	FISIK	KEU ANG	Ang								
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						65600.00	580.000.000	4,00	250.000.000	4,00	250.000.000			62786	351.643.800	4	149.312.700	4	281.954.400							60,63%		59,73%			48,61%					
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					28990.00	1.152.450.000	1,00	1.152.450.000	12,00	1.695.250.000			27549	787.188.500	1	1.145.362.250	12	1.396.020.000							68,31%		99,38%			82,35%						
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					34025.00	1.500.550.000	1,00	628.000.000	12,00	750.000.000			13955	532.723.000	1	399.715.750	12	749.662.000							35,50%		63,65%			99,95%						
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD																																				
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	1.594.996.500	100%	6.051.916.614	100%	3.546.000.000			104,42	1.410.657.500	100%	6.000.039.290	90,91	2.420.534.000							88,44%		99,14%			68,26%						
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						1.594.996.500	13,00	6.051.916.614	220,00	3.546.000.000				1.410.657.500	13	6.000.039.290	200	2.420.534.000							88,44%		99,14%			68,26%						
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD																																				
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	6.717.531.478	100%	6.778.044.920	100%	6.495.989.600			75,89	6.133.659.788	91,67	6.377.131.246	99,41	6.175.313.831							91,31%		94,09%			95,06%						
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1002.00	50.000.000	750,00	25.000.000	566,00	25.000.000			620	2.003.000	750	2.979.000	556	3.814.000							4,01%		11,92%			15,26%						
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					192.00	925.000.000	4,00	1.110.000.000	36,00	1.300.000.000			192	776.531.292	3	1.032.854.504	36	1.169.231.201							83,95%		93,05%			89,94%						
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12.00	5.742.531.478	1.236,00	5.643.044.920	12,00	5.170.989.600			9	5.355.125.496	1.236	5.341.297.742	12	5.002.268.630							93,25%		94,65%			96,74%						
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD																																				
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	6.063.316.564	100%	7.728.316.564	100%	7.758.316.564			99,91	5.501.862.799	100	7.136.400.651	80	6.316.272.686							90,74%		92,34%			81,41%						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dara dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target												Realisasi												Capaian											
			2020			2021			2022			2023			2024			2020		2021		2022			2023			2024										
			F	K	ANG	F	K	ANG	FISIK	KEUANGAN	ANG	FISIK	KEUANGAN	ANG	FISIK	KEUANGAN	ANG	F	K	F	K	FISIK	KEU	ANG	FISIK	KEU	ANG	FISIK	KEU	ANG								
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						4,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000				4	83.505.300	1	67.419.500	1	31.321.262											55,67	44,95		20,88		
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						37,00	550.000.000	31,00	550.000.000	33,00	400.000.000				37	477.074.774	31	278.338.344	33	320.262.196											86,74	50,61		80,07		
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12,00	100.000.000	1,00	100.000.000	100,00	100.000.000				12	97.500.000	1	99.165.104	0	0											97,50	99,17		0,00		
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						211,00	335.000.000	11,00	400.000.000	177,00	730.000.000				210	327.630.000	11	371.293.740	177	357.471.500											97,80	92,82		48,97		
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						24757,00	4.928.316.564	24.757,00	6.528.316.564	4,00	6.378.316.564				24757	4.516.152.725	24.757	6.320.183.963	4	5.607.217.728											91,64	96,81		87,91		
		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD																																				
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							100%	58.007.950.000	100%	58.007.950.000	100%	59.769.279.360				100	53.511.951.926		53.148.084.007	89,33	52.568.312.350											92,25	91,62		87,95		
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD						700,00	57.157.950.000	600,00	57.157.950.000	650,00	58.769.279.360				700	52.719.591.801	600	52.454.839.007	637	51.663.690.350											92,23	91,77		87,91		
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan						300,00	700.000.000	5,00	700.000.000	7,00	850.000.000				300	684.600.000	5	625.000.000	7	808.400.000											97,80	89,29		95,11		
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD						1,00	150.000.000	50,00	150.000.000	50,00	150.000.000				1	107.760.125	25	68.245.000	35	96.222.000											71,84	45,50		64,15		
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD							100%	750.000.000	100%	1.000.000.000	100%	900.000.000				100	527.556.853		734.456.802	100	704.978.197												70,34	73,45		78,33	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						40,00	750.000.000	40,00	1.000.000.000	12,00	900.000.000				40	527.556.853	40	734.456.802	12	704.978.197												70,34	73,45		78,33	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dara dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target												Realisasi												Capaian											
			2020			2021			2022			2023			2024			2020		2021		2022			2023			2024										
			F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K						
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester						1,00	550.000.000	1,00	550.000.000	1,00	735.000.000					1	336.758.746	1	206.579.309	1	529.306.120									61,23		37,56		72,01		
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						1,00	870.000.000	1,00	1.050.000.000	1,00	1.500.000.000					1	818.574.330	1	601.413.456	1	1.340.088.413							94,09		57,28		89,34				
		Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD																																				
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							100%	3.771.389.264	100%	22.345.241.960	100%	35.063.500.272					100	2.912.442.398	100%	18.595.478.430	100	22.966.269.251							77,22		83,22		65,50				
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						1,00	53.370.000	12,00	4.398.347.240	12,00	6.127.821.100					1	5.698.250	12	3.897.507.201	12	3.967.252.609							10,68		88,61		64,74				
4.02.02.2.03.02	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						1,00	53.370.000	12,00	4.398.347.240	12,00	6.127.821.100					1	3.870.750	12	3.682.041.520	12	4.195.569.512							7,25		83,71		68,47				
4.02.02.2.03.03	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						1,00	53.340.000	12,00	4.398.347.240	12,00	6.127.821.100					1	3.699.500	12	3.684.949.350	12	3.746.116.856							6,94		83,78		61,13				
4.02.02.2.03.04	Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						1,00	53.370.000	12,00	4.398.347.240	12,00	6.127.821.100					1	4.713.000	12	3.637.563.453	12	3.563.908.008							8,83		82,70		58,16				
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						1,00	1.095.555.014	1,00	1.000.600.000	1,00	1.490.000.000					1	688.913.664	1	689.405.905	1	1.249.106.151							62,88		68,90		83,83				
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Penggunaan Anggaran						1,00	1.859.000.000	1,00	2.694.265.000	1,00	7.220.632.000					1	1.602.192.984	1	2.233.087.956	1	4.523.839.468							86,19		82,88		62,65				
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						1,00	603.384.250	1,00	1.056.988.000	1,00	1.841.583.872					1	603.354.250	1	770.923.045	1	1.720.486.647							100,0		72,94		93,42				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dara dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target												Realisasi												Capaian											
			2020			2021			2022			2023			2024			2020		2021		2022			2023			2024										
			F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K	F	K								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33						
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						100%	17.347.349.500	100%	24.410.900.000	100%	20.650.900.000					93,57	12.656.863.774	101,57	14.446.168.871	100	15.265.022.668						72,96%		59,18%		73,92%						
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD									1,00	647900000									1	580916007					#DIV/0!	#DIV/0!		89,66%								
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					325,00	7.200.000.000	13,00	8.200.000.000	6,00	5.142.100.000					325	4.748.266.393	13	2.257.978.608	6	2.203.777.325						65,95%		27,54%		42,86%						
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Buku Kode Etik DPRD					60,00	50.000.000									60	50.000.000									100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!								
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli					204,00	2.341.612.000	204,00	2.341.612.000	204,00	2.341.612.000					204	2.106.352.400	204	1.661.630.000	204	2.048.500.000						89,95%		70,96%		87,48%						
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi					72,00	756.000.000	72,00	756.000.000	54,00	756.000.000					72	723.910.000	72	717.200.000	54	727.200.000						95,76%		94,87%		96,19%						
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						5.861.372.000	51,00	11.228.288.000	12,00	9.978.288.000						3.995.044.960	55	8.107.492.582	12	8.718.517.469						68,16%		72,21%		87,37%						
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD					3,00	1.138.365.500	3,00	1.885.000.000	3,00	1.785.000.000					3	1.033.290.021	3	1.701.867.681	3	986.111.867						90,77%		90,28%		55,24%						
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						100%	10.077.450.000	100%	12.447.800.000	100%	8.970.065.600					100	8.996.360.000	88,89	10.630.983.618	100	7.911.190.196						89,27%		85,40%		88,20%						
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD					3,00	230.625.000	3,00	405.975.000	3,00	284.182.500					3	218.350.000	3	258.310.000	3	164.870.000						94,68%		63,63%		58,02%						
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun					3,00	25.000.000	3,00	1.225.000.000	3,00	1.225.000.000					3	24.450.000	2	1.183.081.368	3	556.879.096						97,80%		96,58%		45,46%						
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses					3,00	9.821.825.000	3,00	10.816.825.000	2,00	7.460.883.100					3	8.753.560.000	3	9.189.592.250	2	7.189.441.100						89,12%		84,96%		96,36%						
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						100%	0	100%	700.000.000	100%	2.780.707.600								631.616.307	100	1.203.379.920					#DIV/0!			90,23%		43,28%						
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD							12,00	700.000.000	12,00	2.780.707.600								631.616.307	12	1.203.379.920					#DIV/0!			90,23%		43,28%						
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah						100%	3.700.000.000	100%	0	100%	0					86,19	3.237.604.189		0		0						87,50%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi							3.700.000.000										3.237.604.189										87,50%		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
4.02.02.2.08	Peningkatan Kapasitas DPRD						100%	32.305.045.000	100%	14.545.820.000	100%	17.745.285.000					88,73	13.818.867.903		8.348.927.760	100	12.071.339.945						42,78%		57,40%		68,03%						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dara dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target												Realisasi												Capaian									
			2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024					
							FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	F	K	F	K	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	F	K	F	K	FISIK	KEU ANG	FISIK	KEU ANG	FISIK	KEU ANG				
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					159.00	29.004.338.000	12,00	6.745.820.000	5,00	2.245.820.000			159	11.717.020.621	4,00	1.813.654.160	5	2.062.386.610									40,40	26,89		91,83				
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun					1,00	383.387.000	2,00	1.000.000.000	1,00	1.000.000.000			1	347.462.500	2,00	718.751.627	1	829.467.041									90,63	71,88		82,95				
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan					36,00	1.428.840.000	36,00	1.300.000.000	12,00	3.200.340.000			19	832.060.782	3,00	4.755.935.323	12	1.276.297.345									58,23	365,84		39,88				
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah					94,00	1.488.480.000	3,00	5.500.000.000	3,00	11.299.125.000			96	922.324.000	36,00	1.060.586.650	3	7.903.188.949									61,96	19,28		69,95				

Kesimpulan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, berdasarkan analisis terhadap tabel kinerja yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa:

Pencapaian Kinerja: Sekretariat DPRD telah melaksanakan berbagai program dengan indikator kinerja yang beragam. Meskipun beberapa program menunjukkan capaian yang baik, terdapat juga program yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Kesenjangan Antara Target dan Capaian: Terdapat kesenjangan yang signifikan antara capaian aktual dan kondisi ideal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua program dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program.

Optimalisasi Sumber Daya: Tabel menunjukkan perlunya pengoptimalan sumber daya, baik dari segi keuangan maupun sumber daya manusia, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Pentingnya Koordinasi dan Monitoring: Kinerja yang bervariasi menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antar unit kerja serta perlunya sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Transparansi dan Akuntabilitas: Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi mengenai program dan capaian kinerja kepada publik, guna membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan Sekretariat DPRD adalah Seluruh Anggota DPRD dalam hal pelayanan administrasi dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam hal ini Sekretariat DPRD mempunya tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.1.5. Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan
 - a. Kualitas Layanan yang Tidak Konsisten: Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD menunjukkan fluktuasi, yang mengindikasikan adanya masalah dalam konsistensi layanan.
 - b. Tidak tercapainya target Pengesahan Raperda menjadi Perda: Prosentase Raperda yang disahkan tepat waktu masih di bawah target, menunjukkan adanya kendala dalam proses legislasi.
 - c. Agenda DPRD yang dinamis: Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan tugas Anggota DPRD menjadi terkendala dikarenakan sering terjadi perubahan jadwal pembahasan dari agenda yang telah ditetapkan.
 - d. Keterlambatan dalam Pembahasan LKPJ: Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu menunjukkan adanya masalah dalam koordinasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah.
 - e. Nilai AKIP yang tidak mencapai target: Nilai AKIP Perangkat Daerah menunjukkan angka yang tidak

memuaskan, mencerminkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan.

2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan.

Tantangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

a. Meningkatnya harapan masyarakat:

Masyarakat mengharapkan layanan yang lebih baik dan transparan, yang menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD untuk memenuhi ekspektasi tersebut.

b. Sumber Daya Manusia yang terbatas:

Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM di Sekretariat DPRD dapat menghambat efektivitas pelayanan.

c. Kompleksitas proses legislasi:

Proses legislasi yang kompleks dan memerlukan banyak tahapan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengesahan Raperda.

d. Perubahan kebijakan yang cepat:

Perubahan kebijakan yang cepat di tingkat nasional dan regional dapat menyulitkan Perangkat Daerah dalam menyesuaikan diri.

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu:

a. Pemanfaatan teknologi informasi:

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan.

b. Kerjasama dengan Stakeholder:

Membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder dapat meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas.

c. Program pelatihan untuk SDM:

Mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM di Sekretariat DPRD.

d. Inisiatif partisipasi masyarakat:

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

e. Pengembangan sistem pelaporan yang efektif:

Mengembangkan sistem pelaporan yang lebih efektif untuk memantau kinerja dan hasil program.

2.1.6. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Bekasi melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dampak

luasnya yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya bangkit terhadap janji politik yang perlu diwujudkan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah, lembaga, dan organisasi lainnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.

b. Penguatan Kapasitas SDM. Memperkuat kapasitas SDM Sekretariat DPRD dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Didalam menjalankan perannya, Sekretariat DPRD menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada dengan cara seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan karir, maupun peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan produktivitas kerja dapat meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan, mengatasi tantangan, membangun inovasi, meningkatkan daya saing bagi organisasi.

c. Optimalisasi Proses Legislasi. Mengoptimalkan proses legislasi untuk memastikan pengesahan Raperda dan

anggaran tepat waktu. Optimalisasi proses legislasi berkaitan erat dengan dengan efektivitas DPRD Kota Bekasi dan/atau fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam membuat pembentukan peraturan-peraturan, mulai dari proses pembahasan sampai dengan proses pengesahan belum optimal. Kepentingan politik, kualitas produk legislasi serta kemampuan SDM berpengaruh kepada optimalnya proses legislasi.

d. Optimalisasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan

Selain menyusun Peraturan Daerah terdapat dua fungsi lain yang harus dijalankan oleh DPRD Kota Bekasi, yaitu fungsi penganggaran dan pengawasan. Fungsi penganggaran terkait dengan penyusunan dan pengesahan APBD dan APBDP Kota Bekasi termasuk, sedangkan fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terdistribusi kepada perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Optimalisasi dukungan terhadap kedua fungsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPRD Kota Bekasi.

e. Peningkatan Harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif.

Meningkatkan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Hal ini sangat penting yaitu untuk memastikan agar pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. Harmonisasi yang baik akan Meningkatkan kolaborasi yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran.

Tabel 2. 3
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan kualitas layanan Sekretariat DPRD	Kualitas layanan yang tidak konsisten		Perubahan iklim dan dampaknya terhadap kebijakan publik	Reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi
Meningkatnya harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Tepat waktu dalam pengesahan Raperda		Inisiatif global untuk pemerintahan yang lebih baik	Kebijakan nasional untuk penguatan legislasi daerah	Kerjasama antar daerah dalam pengembangan kebijakan	Optimalisasi proses legislasi
Meningkatnya profesionalisme Sekretariat DPRD	Kualitas SDM yang masih belum dapat memenuhi tuntutan pekerjaan			Kebijakan moratorium dalam pengangkatan pegawai		Penguatan kapasitas SDM
Nilai AKIP Perangkat Daerah yang tidak meningkat	Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal		Agenda global untuk akuntabilitas pemerintahan	Kebijakan nasional untuk peningkatan kinerja Perangkat Daerah	Program regional untuk peningkatan kinerja	Pengembangan kebijakan berbasis data
Peningkatan partisipasi masyarakat	Keterbatasan informasi atas agenda kerja Anggota DPRD		Gerakan global untuk partisipasi masyarakat	Kebijakan nasional untuk mendorong partisipasi publik	Inisiatif regional untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat	Peningkatan penyebaran informasi

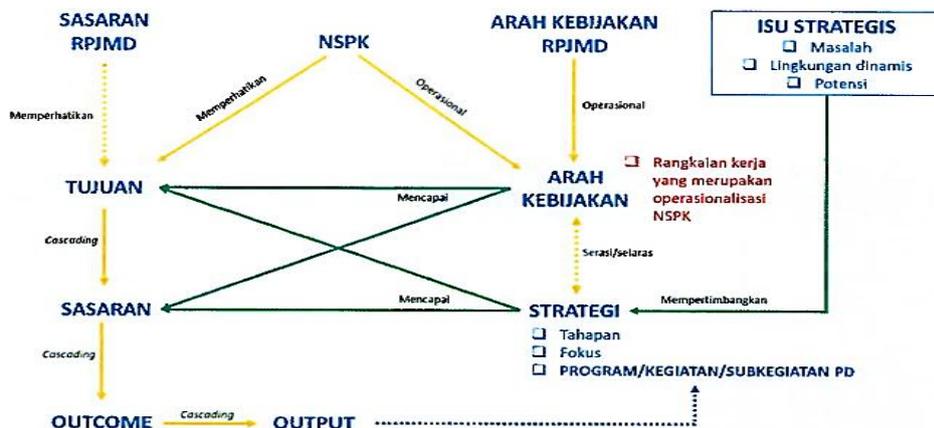
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada periode tahun 2025-2029. NSPK yang diterapkan merupakan acuan utama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dalam menjalankan berbagai kebijakan, program, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Gambar 3. 1
Konsep Renstra PD

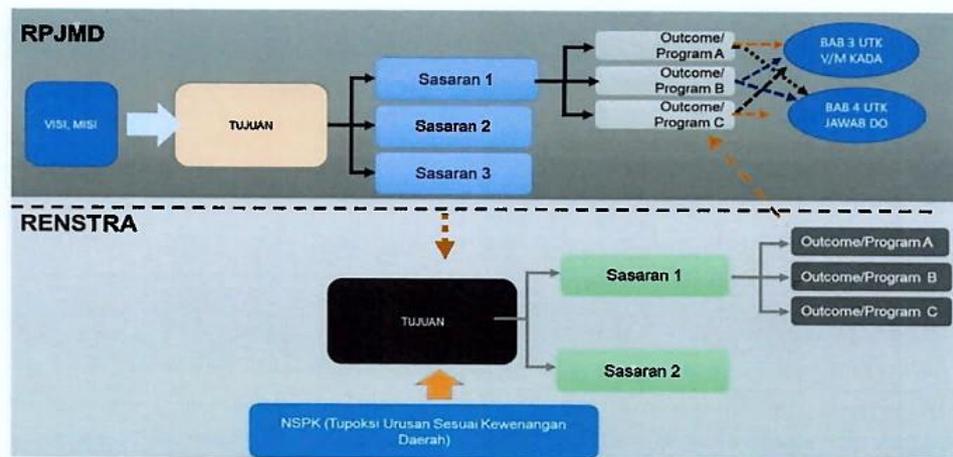


Sumber: Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Dalam rangka mendukung visi misi Pemerintah Kota Bekasi serta selaras dengan arah pembangunan Jawa Barat 2025-2029 dan implementasi Asta Cita 2025-2029 pada tingkat nasional, Sekretariat DPRD Kota Bekasi wajib mengikuti dan mengimplementasikan NSPK yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap proses administratif, pengelolaan dokumen, pelaksanaan anggaran, serta pelayanan publik terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Gambar 3. 2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber: Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

A. UU 23 Tahun 2014/ PP 18 Tahun 2016

Sebagaimana telah diamanatkan pada Paragraf 7 Pasal 162 ayat (10) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Demikian juga pada Paragraf 2 Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyelenggarakan:

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

B. Asta Cita

Asta Cita merupakan visi-misi pembangunan nasional untuk periode tahun 2025-2029 yang diusung oleh pemerintah pusat sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Asta Cita mengandung Visi yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dan delapan misi utama yang mengarahkan pembangunan nasional ke arah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Gambar 3. 3
Visi Kabinet Merah Putih

Bersama	Prabowo dan Gibran mengajak Putra Putri Terbaik Bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama
Indonesia Maju	Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Menuju	Dengan tujuan yang jelas, yaitu
Indonesia Emas	Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat

Gambar 3. 4
8 (delapan) Misi Utama Asta Cita

1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mengoptimalkan implementasi Asta Cita, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan visi dan misi pembangunan di tingkat provinsi maupun daerah.

C. Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan visi dan misi sebagai pedoman strategis pembangunan daerah untuk periode 2025-2029. Visi dan misi ini dirumuskan dengan memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang beragam dan dinamis. Melalui visi dan misi tersebut, Jawa Barat berkomitmen untuk menjadi provinsi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, yang mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia, mengembangkan ekonomi yang adil, serta melestarikan lingkungan hidup demi kesejahteraan seluruh warga.

Visi dari Provinsi Jawa Barat yaitu Jabar Istimewa, yaitu situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur **berkeinginan/ berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat**, baik Istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Visi Jabar Istimewa ini didukung dengan 4 (empat) misi yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkarakter;
2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;
3. Menjaga keseimbangan Disparitas Pembangunan Utara-Selatan, Miskin dan Kaya, serta Perkotaan dan Pedesaan;

4. Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, berorientasi pelayanan, dan sesuai dengan prinsip *Good and Clean Governance*.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi menyelaraskan visi dan misi daerahnya dengan visi dan misi provinsi guna menjamin keselarasan pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan Jawa Barat secara menyeluruh.

D. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJ Perangkat Daerah. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”

Visi ini memiliki kandungan makna bahwa “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera”. Kata “yang Semakin” menunjukkan semangat pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Apa yang sudah baik, dilanjutkan. Apa yang tidak baik, dihilangkan. Apa yang masih kurang, diperbaiki. Apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa yang belum sempurna, disempurnakan. Hal ini tentunya sejalan dengan tahap pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang

menekankan pada penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi.

Kata “Nyaman” menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan berbudayanya di Kota Bekasi.

Kata “Sejahtera” menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan warga kotanya yang baik, dalam arti cukup “sandang, pangan, dan papan” serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Dalam rumusan dan penjelasan visi di atas, dijiwai dan disemangati dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain berke-Tuhanan, berwawasan kebangsaan, berkeadilan rakyat, kebersamaan (gotong royong), keterbukaan, inovatif dan kreatif.

Gambar 3. 5
Visi Kota Bekasi

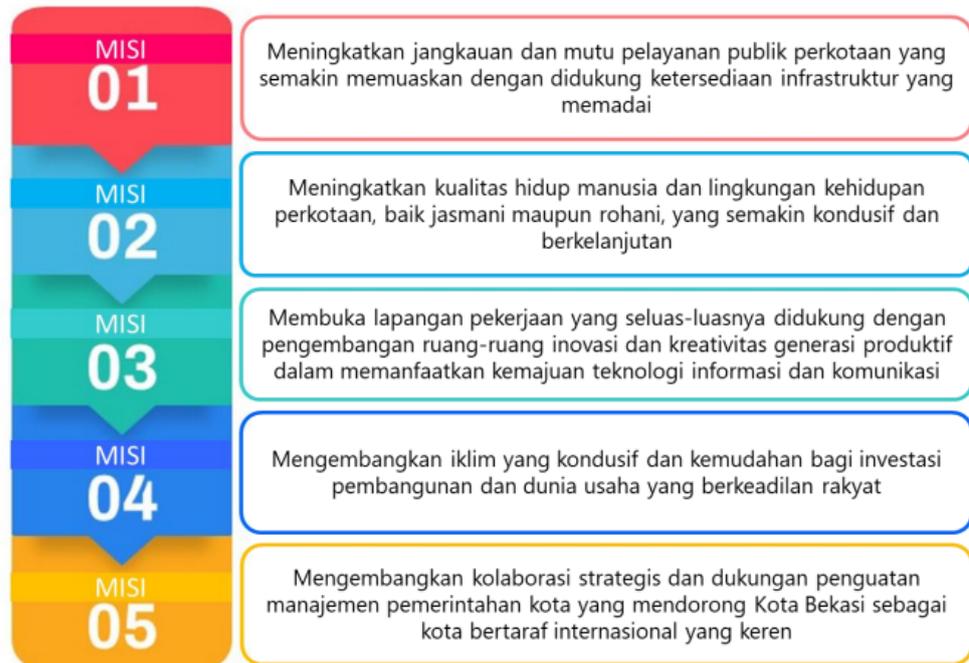


Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah)

E. Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 6
Misi Kota Bekasi

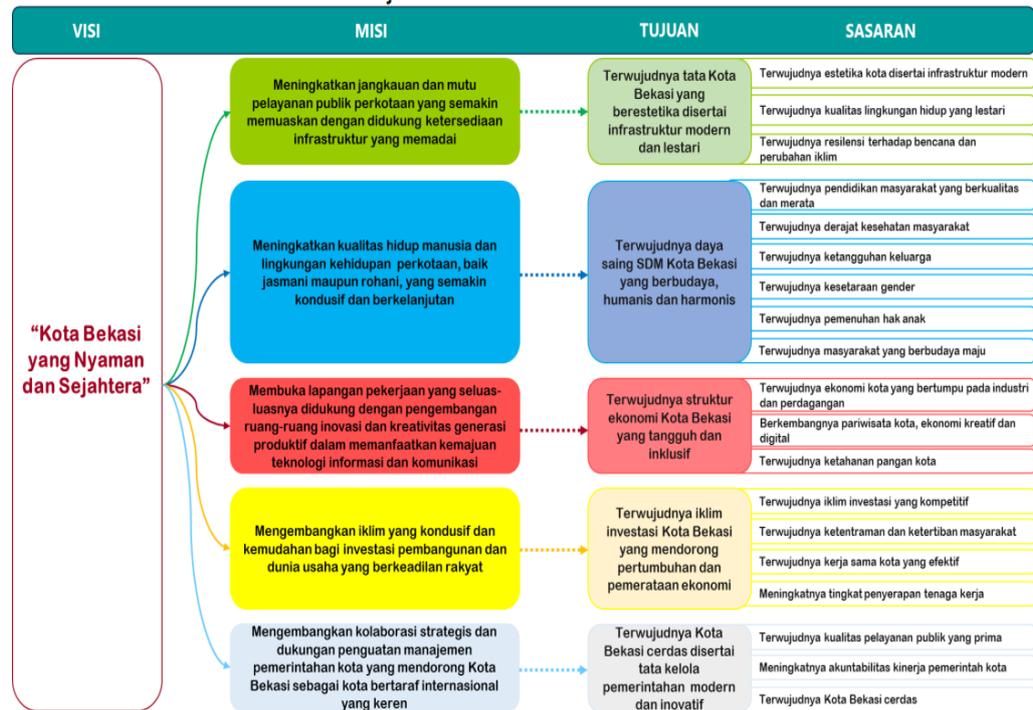


Sumber: Naskah Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2025 (diolah)

F. Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan Pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Gambar 3. 7
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi



Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

G. Tujuan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode lima tahun. RPJMD berfungsi untuk mengarahkan dan menyelaraskan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, termasuk Sekretariat DPRD, dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

Dari data di atas, keterkaitan antara Sekretariat DPRD Kota Bekasi dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bekasi adalah:

- Visi : Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera
- Misi : Misi ke 5 (lima), yaitu Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.
- Tujuan : Tujuan ke 5 (lima), yaitu Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata Kelola pemerintahan modern yang inovatif.
- Sasaran: Sasaran ke-17 (tujuh belas) yaitu “Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima” dan Sasaran ke-18 (delapan belas) yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota”.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkomitmen untuk menyusun rencana strategis yang berlandaskan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. IKK ini menjadi acuan penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil selama periode 2025-2029, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Tabel 3. 1
Tujuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat DPRD menggunakan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan sebagai ukuran utama yang diperoleh menggunakan metode survey kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Indikator ini mencerminkan sejauh mana Sekretariat mampu memberikan layanan yang responsif, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan.

3.2 Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi secara optimal, Sekretariat DPRD menetapkan tujuan strategis utama, yaitu mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif dan efisien. Tujuan ini menjadi landasan bagi seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam rencana strategis tahun 2025-2029.

Untuk mencapai tujuan dan indikator tersebut, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis yang menjadi fokus pengembangan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD, yaitu:

Tabel 3. 2
Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya Efektivitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD
	Terpenuhinya Fasilitasi Proses Legislasi dan Kajian Hukum DPRD
	Optimalisasi Dukungan Penganggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sumber data: Sekretariat DPRD Kota Bekasi (diolah)

Keterkaitan yang erat antara tujuan, indikator, dan sasaran ini menciptakan kerangka kerja yang sinergis bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menyusun dan melaksanakan rencana strategisnya. Dengan mengedepankan tingkat kepuasan anggota DPRD sebagai indikator kunci, seluruh sasaran yang telah ditetapkan diarahkan untuk menghasilkan pelayanan yang profesional dan mendukung ketercapaian tujuan utama. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat peran Sekretariat DPRD sebagai unit pendukung yang handal dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 3. 3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya Efektivitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	70	70.50	71	71.50	72	72.50	Nilai
		Terpenuhinya Fasilitas Proses Legislasi dan Kajian Hukum DPRD	Persentase Fasilitas pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen (%)
		Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
		Optimalisasi Dukungan Penganggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Perse n (%)

Dalam upaya meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD, kami telah menetapkan beberapa sasaran yang terukur dan relevan. Setiap sasaran ini akan dievaluasi menggunakan indikator yang telah ditentukan, yang akan memberikan gambaran jelas tentang pencapaian kinerja. Berikut adalah penjelasan mengenai indikator dan rumus pengukurannya:

1. Nilai AKIP Sekretariat DPRD

AA (Bobot nilai 100)	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)

C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Sumber data PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021

2. Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda menjadi Perda Tahun N

Untuk mengukur nilai persentase dalam fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Raperda tahun N, dihitung dengan rumus:

Persentase fasilitasi pembahasan Raperda = (Jumlah pembahasan Raperda yang terfasilitasi ÷ Jumlah permohonan pembahasan Raperda) × 100%

3. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N

Dalam rangka memastikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan tepat waktu, kami mengukur ketepatan penetapan Perda dengan rumus:

Ketepatan Penetapan Perda = Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu

4. Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, kami menggunakan indikator persentase fasilitasi pengawasan, yang dihitung dengan rumus:

Persentase fasilitasi pengawasan = (Pengawasan dilaksanakan ÷ Pengawasan direncanakan) × 100 %

3.3 Strategi Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD merumuskan strategi yang terintegrasi dan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan. Strategi ini disusun berdasarkan 2 (dua) program utama yang mencakup outcome dan indikator yang relevan, serta sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Outcome:

1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran;
2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan;
3. Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.

Indikator Kinerja Utama:

Nilai AKIP Sekretariat DPRD

Program 2: Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Outcome:

1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan.

Indikator Kinerja Utama:

1. Persentase fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N;
2. Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N;
3. Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;

Indikator Kinerja Kunci:

1. Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N;
2. Persentase penetapan Raperda Tahun N; serta
3. Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan.

Dengan menerapkan strategi ini, Sekretariat DPRD berkomitmen untuk memberikan dukungan maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan arahan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Melalui upaya ini, diharapkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan pengawasan dapat meningkat, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, dengan dukungan yang efektif terhadap fungsi-fungsi DPRD ini, Sekretariat DPRD secara tidak langsung berkontribusi pada Visi Kota Bekasi: Kota Bekasi yang nyaman dan Sejahtera dan Misi ke 5 (lima): Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren, serta Tujuan ke 5 (lima): Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif juga

Sasaran ke-17 (tujuh belas): Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima. Pengawasan yang baik akan mendorong kinerja Perangkat Daerah yang lebih akuntabel, dan proses legislasi yang transparan akan menghasilkan peraturan yang lebih baik. Peningkatan Nilai AKIP Sekretariat DPRD (indikator sasaran RPJMD) akan dipengaruhi oleh kualitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD secara keseluruhan.

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan yang diambil oleh Sekretariat DPRD diawali dengan dilakukan penahapan prioritas tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD. Tahapan rencana program dimulai dari peningkatan kualitas pelayanan, potimalisasi tata kerja dan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi.

Tabel 3. 4
Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Prioritas pada peningkatan kualitas pengesahan perda, penganggaran dan pengawasan melalui	Prioritas pada peningkatan kualitas pengesahan perda, penganggaran dan pengawasan melalui	Prioritas pada peningkatan kualitas pengesahan perda, penganggaran dan pengawasan melalui peningkatan kualitas	Prioritas pada peningkatan kualitas pengesahan perda, penganggaran dan pengawasan melalui	Prioritas pada peningkatan kualitas pengesahan perda, penganggaran dan pengawasan melalui

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
peningkatan kualitas pelayanan	optimalisasi tata kerja dan tata kelola	sumber daya manusia	peningkatan sarana dan prasarana	pemanfaatan teknologi informasi dan penyebaran informasi

Sebagai bentuk operasionalisasi sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan arah kebijakan RPJMD Kota Bekasi serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi dapat dirumuskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan
Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.	Peningkatan tata kelola pemerintahan berorientasi melayani	Peningkatan kualitas administrasi kesekretariatan dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.	
Optimalisasi tata kerja dan tata kelola melalui evaluasi dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Peta Proses Bisnis, Analisa Jabatan, Peta Jabatan, Informasi Jabatan, Evaluasi Jabatan, serta Evaluasi Kelembagaan				
Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Sekretariat DPRD melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan sesuai jabatan.				

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
			<p>Peningkatan sarana dan prasarana melalui pengembangan fasilitas kantor yang produktif serta pemeliharaan dan perawatan aset</p>	
			<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui pemanfaatan platform digital untuk penyebarluasan informasi terkait kegiatan DPRD kepada masyarakat serta mengoptimalkan penggunaan media sosial dan website resmi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.</p>	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program

Program-program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi selama periode Tahun 2025-2029 merupakan turunan (cascading) logis dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Program-program ini didesain untuk mencapai outcome dan output yang terukur, yang pada akhirnya berkontribusi pada dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang digunakan dalam Renstra ini sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhiran terakhir, sehingga menjamin keselarasan dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah secara nasional.

Dalam upaya mencapai kinerja Perangkat Daerah yang optimal, Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan melaksanakan program-program yang terstruktur dan terukur mulai Tahun 2025 hingga Tahun 2029, dan bahkan mempertimbangkan kesinambungan hingga Tahun 2030 sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2030.

Adapun program-program utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini secara umum bertujuan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD. Di dalamnya mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang esensial, antara lain:

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD:

Program ini secara khusus dirancang untuk memperkuat kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kegiatan dan sub kegiatan dalam program ini meliputi:

Program-program ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam uraian kegiatan dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif untuk setiap tahun anggaran selama periode 2025-2029. Selain itu, akan diidentifikasi pula sub kegiatan yang secara spesifik mendukung program prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi.

4.2 Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi:

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja);
- 2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencakup:

- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
- 1) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
 - 2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
 - 2) Penyediaan bahan logistik kantor;
 - 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Fasilitasi kunjungan tamu; serta
 - 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik; serta
 - 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

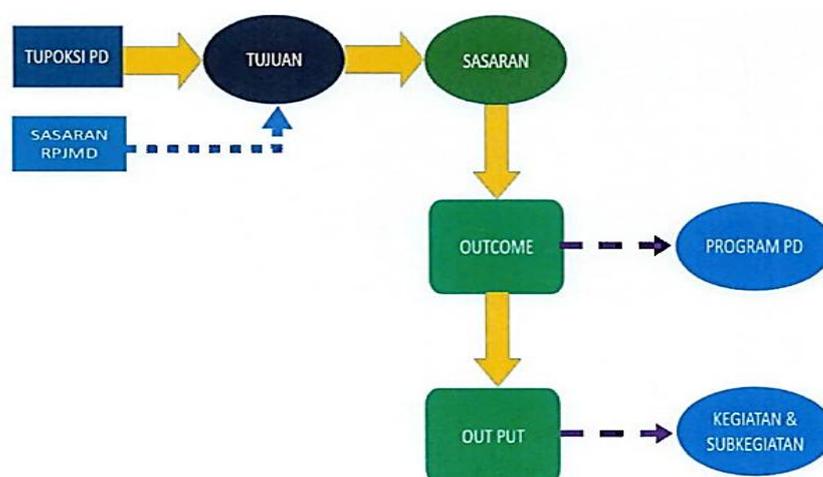
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan mebel;
 - 4) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; serta
 - 5) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
- h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD:
- 1) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD,
 - 2) Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD, serta
 - 3) Pelaksanaan medical check-up DPRD.
- i. Layanan Administrasi DPRD:
- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD;
 - 2) Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD:
- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD:
- 1) Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah;
 - 2) Pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - 3) Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
 - 4) Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik;
 - 5) Penyusunan tata tertib DPRD; serta
 - 6) Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran:
 - 1) Pembahasan KUA dan PPAS;
 - 2) Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 - 3) Pembahasan APBD;
 - 4) Pembahasan APBD perubahan;
 - 5) Pembahasan laporan semester; serta
 - 6) Pembahasan pertanggungjawaban APBD.
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan:
 - 1) Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum;
 - 2) Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur;
 - 3) Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
 - 4) Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian;
 - 5) Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK;
 - 6) Pengawasan penggunaan anggaran; serta
 - 7) Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah.
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD:
 - 1) Orientasi DPRD;
 - 2) Pendalaman tugas DPRD;
 - 3) Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli;
 - 4) Penyediaan tenaga ahli fraksi;
 - 5) Penyelenggaraan hubungan masyarakat; serta
 - 6) Penyusunan program kerja DPRD dalam rangka persentase terfasilitasinya kegiatan DPRD.
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat:

- 1) Kunjungan kerja dalam daerah,
 - 2) Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD
 - 3) Pelaksanaan reses; serta
 - 4) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah.
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD:
Pengawasan kode etik DPRD.
- g. Fasilitasi Tugas DPRD:
- 1) Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD;
 - 2) Penyusunan laporan kinerja DPRD;
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah;
serta
 - 4) Fasilitasi tugas Pimpinan DPRD.

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Gambar 4. 1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan Renstra PD



Program-program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada Tahun 2025, yang sekaligus menjadi pijakan awal pelaksanaan Rencana

Strategis Tahun 2025-2029, terbagi dalam dua program utama yang mendukung operasional Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD. Rincian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian, dan pagu indikatif untuk Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Meningkatnya Efektivitas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		
					1. Nilai AKIP Sekretariat DPRD		
					1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
					1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	2. Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK rah	2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
					Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4. Koordinasi dan Penyusunan Lapran Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	3. Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
					2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
				4. Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK h	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	5. Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12. Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
			4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel				
			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan						
			6. Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Daerah sesuai NSPK			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		
				7. Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	8. Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	20. Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	
					2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
					Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan kesejahteraan DPRD	8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	23. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	24. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Terpenuhiya Fasilitasi Proses Legislasi dan Kajian Hukum DPRD	2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	9. Tersusunnya Laporan Administrasi DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
					2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
					Jumlah Laporan Administrasi DPRD	9. Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	26. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	27. Fasilitasi Fraksi DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	28. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	29. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	
					1. Persentase penetapan Ranperda tahun N		
					Persentase Fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N	II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Tersusunnya Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	30. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	31. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	32. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	33. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	34. Penyusunan Tata Tertib DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	35. Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	
					2. Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	2. Terbahasnya Kebijakan Anggaran	Ketepatan Penetapan Perda APBD tahun N		
					Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	2. Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	36. Pembahasan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	37. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	38. Pembahasan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	39. Pembahasan APBD Perubahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	40. Pembahasan Laporan Semester	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	41. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				
		3. Optimalisasi Dukungan Penganggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan			3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemerintahan	2. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	3 Tersusunnya Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
					1. Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	42. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	43. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	45. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				4. Tersusunnya Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	46. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	47. Pengawasan Penggunaan Anggaran	
					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	48. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
					2. Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD		
					Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	4. Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	49. Orientasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	50. Pendalaman Tugas DPRD	
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	51. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	52. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	53. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				5. Tersusunnya Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	54. Penyusunan Program Kerja DPRD	
					Jumlah Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5. Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	55. Kunjungan Kerja dalam Daerah	
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	56. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	57. Pelaksanaan Reses		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	58. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		
				6. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	59. Pengawasan Kode Etik DPRD	
				7. Tersusunnya Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	7. Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	60. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	61. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	62. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	63. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

Tabel 4. 2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Fisik	Keuangan										
	SEKRETARIAT DPRD				209.165.09 9.233		207.938.55 5.463		219.165.09 9.233		227.104.17 0.960		236.068.34 3.811		244.670.46 1.102		247.117.16 5.712	
4.02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				97.267.144 .761	100 %	110.431.30 0.324	100%	111.816.65 8.562	100%	115.171.15 8.319	100%	119.626.29 3.068	100%	124.141.08 1.861	100%	125.833.57 2.548	
	Outcome: Meningkatny a Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Panganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Panganggaran	Persen (%)	96,5 5%	80.000.000	98%	80.000.000	98%	80.000.000	98%	80.000.000	98%	80.000.000	98%	80.000.000	98%	80.000.000
2.01	Perencanaan, Panganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Dokume n	15	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	12	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Fisik	Keuangan										
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000
	Outcome: Meningkatkan Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)	87	11.403.723.000	88	15.675.969.554	88	16.402.446.000	88	16.892.599.380	88	17.397.457.361	88	17.917.461.082	88	18.453.064.915
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	3	11.403.723.000	18	15.675.969.554	18	16.402.446.000	18	16.892.599.380	18	17.397.457.361	18	17.917.461.082	18	18.453.064.915
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	770	11.363.723.000	2086	15.611.969.554	2086	16.338.446.000	2086	16.828.599.380	2086	17.333.457.361	2086	17.853.461.082	2086	18.389.064.915
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			15	24.000.000	15	24.000.000	15	24.000.000	15	24.000.000	15	24.000.000	15	24.000.000
	Outcome: Meningkatkan Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	86.2	620.000.000	86.2	951.170.000	86.2	951.170.000	86.2	979.705.100	86.2	1.009.096.253	86.2	1.039.369.141	86.2	1.070.550.215
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	2	620.000.000	2	951.170.000	2	951.170.000	2	979.705.100	2	1.009.096.253	2	1.039.369.141	2	1.070.550.215
0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	14	100.000.000	52	379.170.000	52	379.170.000	52	390.545.100	52	402.261.453	52	414.329.297	52	426.759.175
0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	48	520.000.000	48	572.000.000	48	572.000.000	48	589.160.000	48	606.834.800	48	625.039.844	48	643.791.039
	Outcome: Meningkatkan Capaian Kinerja Keuangan Penunjang		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)	87	6.693.836.237	88	7.029.329.562	88	7.241.566.562	88	7.458.813.559	88%	7.882.577.966	88	8.969.055.305	88	8.150.446.964

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
	Urusan																	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	36	6.693.836.237	36	7.029.329.562	36	7.241.566.562	36	7.458.813.559	36	7.882.577.966	36	8.969.055.305	36	8.150.446.964
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	154.500.000	1	159.135.000	1	163.909.050	1	168.826.322
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	2.950.763.000	4	2.937.763.000	4	3.300.000.000	4	3.399.000.000	4	3.500.970.000	4	3.805.999.100	4	3.714.179.073
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	567.823.237	3	459.116.562	3	459.116.562	3	472.890.059	3	487.076.761	3	757.689.064	3	516.739.735
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4	580.000.000	4	580.000.000	4	580.000.000	4	597.400.000	4	615.322.000	4	633.781.660	4	652.795.110
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	1.695.250.000	12	1.902.450.000	12	1.752.450.000	12	1.805.023.500	12	1.959.174.205	12	2.214.949.431	12	1.972.397.914
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	750.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.030.000.000	12	1.160.900.000	12	1.392.727.000	12	1.125.508.810

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
	Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen (%)	96,5 4	3.546.000. 000	96,5 4	1.678.596. 000	96,54	2.200.000. 000	96,54	2.271.520. 000	96,54	2.945.185. 600	96,54	2.721.061. 168	96,54	2.482.151. 235
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Laporan	220	3.546.000. 000	1	1.678.596. 000	1	2.200.000. 000	1	2.271.520. 000	1	2.945.185. 600	1	2.721.061. 168	1	2.482.151. 235
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	220	3.546.000. 000	349	1.678.596. 000	220	2.200.000. 000	220	2.271.520. 000	220	2.945.185. 600	220	2.721.061. 168	220	2.482.151. 235
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)	87	6.495.989. 600	88	3.955.043. 826	88	1.475.000. 000	88	1.519.250. 000	88	1.564.827. 500	88	1.611.772. 325	88	1.660.125. 495
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Laporan	614	6.495.989. 600	60	3.955.043. 826	60	1.475.000. 000	60	1.519.250. 000	60	1.564.827. 500	60	1.611.772. 325	60	1.660.125. 495
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	566	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.750.000	12	26.522.500	12	27.318.175	12	28.137.720
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	1.300.000. 000	36	1.200.000. 000	36	1.200.000. 000	36	1.236.000. 000	36	1.273.080. 000	36	1.311.272. 400	36	1.350.610. 572

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.170.989. 600	12	2.730.043. 826	12	250.000.00 0	12	257.500.00 0	12	265.225.00 0	12	273.181.75 0	12	281.377.20 3
	Outcome: Meningkatny a Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persen (%)	96,5 4	7.758.316. 564	96,5 4	8.442.000. 000	96,54	10.792.000 .000	96,54	11.115.760 .000	96,54	11.449.232 .800	96,54	11.792.709 .784	96,54	12.146.491 .078
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Laporan	315	7.758.316. 564	4	8.442.000. 000	4	10.792.000 .000	4	11.115.760 .000	4	11.449.232 .800	4	11.792.709 .784	4	12.146.491 .078
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	400.000.00 0	33	510.000.00 0	33	510.000.00 0	33	525.300.00 0	33	541.059.00 0	33	557.290.77 0	33	574.009.49 3
0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	100	100.000.00 0	100	100.000.00 0	100	100.000.00 0	100	103.000.00 0	100	106.090.00 0	100	109.272.70 0	100	112.550.88 1
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	177	730.000.00 0	177	832.000.00 0	177	832.000.00 0	177	856.960.00 0	177	882.668.80 0	177	909.148.86 4	177	936.423.33 0
0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	Unit	4	6.378.316. 564	4	7.000.000. 000	4	9.350.000. 000	4	9.630.500. 000	4	9.919.415. 000	4	10.216.997 .450	4	10.523.507 .374

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Fisik	Keuangan										
	lainnya																	
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)	87	59.769.279 .360	88	71.579.191 .382	88	71.634.476 .000	88	73.783.510 .280	88	76.097.015 .588	88	78.676.926 .056	88	80.625.233 .838
2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan kesejahteraan DPRD	Laporan	128	59.769.279 .360	3	71.579.191 .382	3	71.634.476 .000	3	73.783.510 .280	3	76.097.015 .588	3	78.676.926 .056	3	80.625.233 .838
0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/B ulan	650	58.769.279 .360	650	70.644.191 .382	650	70.614.476 .000	650	72.732.910 .280	650	74.914.897 .588	650	77.162.344 .516	650	79.477.214 .852
0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	77	850.000.00 0	6	770.000.00 0	6	770.000.00 0	6	793.100.00 0	6	816.893.00 0	6	1.041.399. 790	6	866.641.78 4
0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	150.000.00 0	50	165.000.00 0	50	250.000.00 0	50	257.500.00 0	50	365.225.00 0	50	473.181.75 0	50	281.377.20 3
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persen (%)	87	900.000.00 0	88	1.040.000. 000	88	1.040.000. 000	88	1.070.000. 000	88	1.200.900. 000	88	1.332.727. 000	88	1.165.508. 810
2.16	Layanan Administrasi DPRD	Tersusunnya Laporan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD	Laporan	12	900.000.00 0	13	1.040.000. 000	13	1.040.000. 000	13	1.070.000. 000	13	1.200.900. 000	13	1.332.727. 000	13	1.165.508. 810

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	0	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000
0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	900.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.030.000.000	12	1.160.900.000	12	1.292.727.000	12	1.125.508.810
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					111.897.954.472	100%	97.507.255.139	100%	107.348.440.671	100%	111.933.012.641	100%	116.442.050.743	100%	120.529.379.241	100%	121.283.593.164
	Outcome: Meningkatkan kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan		Persentase fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N	Persen (%)		17.945.064.000	100%	17.780.418.000	100%	20.638.181.000	100%	22.257.326.430	100%	22.895.046.223	100%	23.051.897.610	100%	23.228.454.538
2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersusunnya Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Laporan	102	17.945.064.000	5	17.780.418.000	6	20.638.181.000	6	22.257.326.430	6	22.895.046.223	6	23.051.897.610	6	23.228.454.538
0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	2	1.000.000.000	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	1	1.693.500.000	1	1.738.305.000	1	1.684.454.150	1	1.631.987.775
0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	10	6.365.000.000	1	6.682.250.000	1	6.682.250.000	1	7.082.717.500	1	7.289.199.025	1	7.401.874.996	1	7.520.931.246

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Fisik	Keuangan										
0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Dokumen	12	5.330.064.000	1	4.135.068.000	1	4.492.831.000	1	4.827.615.930	1	4.966.444.408	1	5.009.437.740	1	5.056.720.872
0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	77	4.500.000.000	1	5.122.010.000	1	5.122.010.000	1	5.475.670.300	1	5.633.940.409	1	5.696.958.621	1	5.764.867.380
0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	750.000.000	1	391.090.000	1	391.090.000	1	402.822.700	1	414.907.381	1	427.354.602	1	440.175.241
0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang			0	0	10.000 orang	2.500.000.000	10.000 orang	2.775.000.000	10.000 orang	2.852.250.000	10.000 orang	2.831.817.500	10.000 orang	2.813.772.025
	Outcome: Meningkatkan kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan		Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat		8.742.432.000	Tepat Waktu	4.100.000.000	Tepat Waktu	6.000.000.000	Tepat Waktu	6.544.118.750	Tepat Waktu	7.000.400.000	Tepat Waktu	7.100.362.000	Tepat Waktu	7.215.030.309
2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terbahasnya Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Laporan	6	8.742.432.000	6	4.100.000.000	6	6.000.000.000	6	6.544.118.750	6	7.000.400.000	6	7.100.362.000	6	7.215.030.309
0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	2.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.500.000.000	1	1.545.000.000	1	1.591.350.000	1	1.639.090.500	1	1.688.263.215
0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1.500.000.000	1	500.000.000	1	1.000.000.000	1	1.030.000.000	1	1.060.900.000	1	1.092.727.000	1	1.125.508.810

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Fisik	Keuangan										
0003	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1.891.012.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.394.118.750	1	1.695.900.000	1	1.636.727.000	1	1.587.486.259
0004	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1.116.420.000	1	750.000.000	1	1.000.000.000	1	1.030.000.000	1	1.060.900.000	1	1.092.727.000	1	1.125.508.810
0005	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1	735.000.000	1	350.000.000	1	500.000.000	1	515.000.000	1	530.450.000	1	546.363.500	1	562.754.405
0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1.500.000.000	1	500.000.000	1	1.000.000.000	1	1.030.000.000	1	1.060.900.000	1	1.092.727.000	1	1.125.508.810
	Outcome: Meningkatkan kualitas penganggaran dan Pengawasan		Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen (%)		35.063.500.272	100%	23.638.514.928	100%	26.027.561.056	100%	26.808.387.888	100%	28.168.729.559	100%	29.123.858.422	100%	29.294.249.271
2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	51	35.063.500.272	51	23.638.514.928	51	26.027.561.056	51	26.808.387.888	51	28.168.729.559	51	29.123.858.422	51	29.294.249.271
0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12	6.127.821.100	12	4.289.420.264	12	4.389.420.264	12	4.521.102.872	12	4.756.735.958	12	4.896.438.037	12	4.940.331.178
0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12	6.127.821.100	12	4.289.420.264	12	4.389.420.264	12	4.521.102.872	12	4.756.735.958	12	4.896.438.037	12	4.940.331.178

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	6.127.821. 100	12	4.289.420. 264	12	4.389.420. 264	12	4.521.102. 872	12	4.756.735. 958	12	4.896.438. 037	12	4.940.331. 178
0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	12	6.127.821. 100	12	4.289.420. 264	12	4.389.420. 264	12	4.521.102. 872	12	4.756.735. 958	12	4.896.438. 037	12	4.940.331. 178
0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1.490.000. 000	1	1.000.000. 000	1	1.000.000. 000	1	1.030.000. 000	1	1.216.990. 035	1	1.192.727. 000	1	1.125.508. 810
0007	Pengawasan Pergunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Pergunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pergunaan Anggaran	Dokumen	1	7.220.632. 000	1	4.500.000. 000	1	5.500.000. 000	1	5.665.000. 000	1	5.834.950. 000	1	6.192.838. 212	1	6.190.298. 455
0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungja waban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	1.841.583. 872	1	980.833.87 2	1	1.969.880. 000	1	2.028.976. 400	1	2.089.845. 692	1	2.152.541. 063	1	2.217.117. 295
	Outcome: Meningkatny a kualitas penganggaran dan Pengawasan		Persentase Fasilitas Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD	Persen (%)		50.146.958 .200	100 %	51.988.322 .211	100%	54.682.698 .615	100%	56.323.179 .573	100%	58.377.874 .961	100%	61.253.261 .209	100%	61.545.859 .046

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersusunnya Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan	24	20.650.900.000	24	22.075.052.000	24	22.555.052.000	24	23.231.703.560	24	24.293.654.667	24	26.146.514.306	24	25.385.909.736
0001	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	647900000	1	27.440.000,00	1	27.440.000,00	1	28.263.200	1	29.111.096	1	29.984.429	1	30.883.962
0002	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	5.142.100.000	6	5.250.000.000	6	5.250.000.000	6	5.407.500.000	6	5.934.725.000	6	6.486.816.750	6	5.908.921.253
0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	204	2.341.612.000	210	2.341.612.000	210	2.821.612.000	210	2.906.260.360	210	2.993.448.171	210	3.083.251.616	210	3.175.749.164
0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	54	756.000.000	72	756.000.000	72	756.000.000	72	778.680.000	72	802.040.400	72	826.101.612	72	850.884.660
0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	9.978.288.000	12	12.000.000.000	12	12.000.000.000	12	12.360.000.000	12	12.730.800.000	12	13.862.724.000	12	13.506.105.720
0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	3	1.785.000.000	3	1.700.000.000	3	1.700.000.000	3	1.751.000.000	3	1.803.530.000	3	1.857.635.900	3	1.913.364.977
2.05	Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersusunnya Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Laporan	8	8.970.065.600	10	15.865.007.500	100%	16.615.007.500	100%	17.113.457.725	100%	17.626.861.457	100%	18.155.667.300	100%	18.700.337.319
001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	3	284.182.500	3	284.182.500	3	284.182.500	3	292.707.975	3	301.489.214	3	310.533.891	3	319.849.907

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Fisik	Keuangan										
0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	3	1.225.000.000	3	925.000.000	3	925.000.000	3	952.750.000	3	981.332.500	3	1.010.772.475	3	1.041.095.649
0003	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	2	7.460.883.100	3	12.855.825.000	3	13.605.825.000	3	14.013.999.750	3	14.434.419.743	3	14.867.452.335	3	15.313.475.905
0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang			750	1.800.000.000	7500	1.800.000.000	7500	1.854.000.000	7500	1.909.620.000	7500	1.966.908.600	7500	2.025.915.858
2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	12	2.780.707.600	12	2.089.068.000	12	2.089.068.000	12	2.151.740.040	12	2.216.292.241	12	2.282.781.008	12	2.351.264.439
0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	12	2.780.707.600	12	2.089.068.000	12	2.089.068.000	12	2.151.740.040	12	2.216.292.241	12	2.282.781.008	12	2.351.264.439
2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Laporan	21	17.745.285.000	16	11.959.194.711	17	13.423.571.115	17	13.826.278.248	17	14.241.066.596	17	14.668.298.594	17	15.108.347.552
0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	5	2.245.820.000			1	1.373.571.115	1	1.414.778.248	1	1.457.221.596	1	1.500.938.244	1	1.545.966.391
0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	1.000.000.000	1	659.194.711	1	750.000.000	1	772.500.000	1	795.675.000	1	819.545.250	1	844.131.608
0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	3	11.299.125.000	3	10.000.000.000	3	10.000.000.000	3	10.300.000.000	3	10.609.000.000	3	10.927.270.000	3	11.255.088.100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Outcome/Output	Satuan	Baseline 2024		Target											
							2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12	3.200.340. 000	12	1.300.000. 000	12	1.300.000. 000	12	1.339.000. 000	12	1.379.170. 000	12	1.420.545. 100	12	1.463.161. 453

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, bab ini secara khusus menguraikan subkegiatan-subkegiatan yang dirancang untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap program-program prioritas pembangunan daerah. Penyusunan daftar subkegiatan prioritas ini didasarkan pada analisis yang cermat mengenai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, program serta kegiatan yang telah direncanakan secara komprehensif, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Keterkaitan yang erat antara operasional Sekretariat DPRD dan agenda pembangunan daerah menjadi landasan utama dalam mengidentifikasi subkegiatan-subkegiatan yang paling relevan dan berdampak.

Tabel berikut menyajikan daftar terstruktur dari subkegiatan prioritas yang telah diidentifikasi memiliki hubungan yang kuat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan program prioritas pembangunan daerah. Setiap subkegiatan dalam tabel ini dipilih dengan pertimbangan matang atas potensinya dalam mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah. Informasi yang disajikan mencakup program induk, kegiatan utama, nama subkegiatan prioritas, serta indikator kinerja yang relevan untuk mengukur keberhasilannya. Selain itu, target kinerja yang spesifik untuk setiap subkegiatan juga dicantumkan sebagai panduan dalam implementasi dan evaluasi.

Uraian lebih lanjut mengenai kontribusi spesifik dari setiap subkegiatan prioritas terhadap program pembangunan daerah akan dijelaskan setelah penyajian tabel ini. Penjelasan tersebut akan memperjelas bagaimana setiap subkegiatan, melalui indikator kinerja dan target yang ditetapkan, secara konkret mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah digariskan. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai peran aktif Sekretariat DPRD dalam menyukseskan agenda pembangunan daerah Kota Bekasi selama periode 2025-2029.

Tabel 4. 3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
SEKRETARIAT DPRD				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
		Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
		Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
			Layanan Administrasi DPRD	
			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan		
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	
			Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan		
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	
			Pembahasan KUA dan PPAS	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Pembahasan APBD	
			Pembahasan APBD Perubahan	
			Pembahasan Laporan Semester	
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan		
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan		
			Peningkatan Kapasitas DPRD	
			Orientasi DPRD	
			Pendalaman Tugas DPRD	
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
			Penyusunan Program Kerja DPRD	
			Pnyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			Pelaksanaan Reses	
			Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	
			Pelaksanaan dan Pengawsan Kode Etik DPRD	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
			Pengawasan Kode Etik DPRD	
			Fasilitasi Tugas DPRD	
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. IKU merupakan ukuran keberhasilan strategis yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Penetapan IKU ini didasarkan pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta kontribusinya terhadap prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi. IKU yang terukur dan relevan akan menjadi acuan penting dalam menilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD selama periode perencanaan.

Tabel berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Setiap IKU diidentifikasi secara spesifik, dilengkapi dengan satuan pengukuran yang jelas, target kinerja tahunan selama periode 2025-2029, serta program dan kegiatan utama yang berkontribusi terhadap pencapaian IKU tersebut. Penetapan target kinerja mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya, potensi sumber daya, serta tantangan dan

peluang yang dihadapi. Dengan adanya IKU dan target yang terstruktur, diharapkan kinerja Sekretariat DPRD dapat dipantau secara efektif dan terarah.

Tabel 4.5 ini memberikan gambaran komprehensif mengenai fokus kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD, serta dalam memberikan pelayanan administrasi yang optimal. IKU yang ditetapkan mencakup aspek-aspek kunci seperti efektivitas fasilitasi pembentukan peraturan daerah, tingkat kepuasan layanan administrasi DPRD, kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta efisiensi pengelolaan sumber daya Perangkat Daerah . Melalui pemantauan berkala terhadap IKU ini, Sekretariat DPRD dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama ini, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki kerangka kerja yang jelas untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilannya dalam mencapai tujuan strategis dan memberikan dukungan yang optimal kepada DPRD dalam menjalankan amanahnya. Capaian target IKU akan menjadi tolok ukur penting dalam laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas di Kota Bekasi.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama PD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Nilai	70	70,50	71	71,50	72	72,50	
2	Persentase fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N	%	100	100	100	100	100	100	
3	Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
4	Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab ini secara spesifik mengidentifikasi dan menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. IKK merupakan sejumlah kecil indikator kinerja yang dianggap paling kritis dan strategis dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan utamanya. Pemilihan IKK didasarkan pada kemampuan indikator tersebut dalam merepresentasikan dampak signifikan dari kinerja Sekretariat DPRD terhadap pencapaian visi dan misi organisasi serta prioritas pembangunan daerah. Dengan fokus pada indikator-indikator kunci ini, diharapkan pengukuran kinerja menjadi lebih terarah dan efektif dalam pengambilan keputusan strategis.

Tabel berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Setiap IKK dilengkapi dengan definisi yang jelas, satuan pengukuran yang terukur, target kinerja tahunan selama periode 2025-2029, serta keterkaitannya dengan program dan kegiatan utama yang mendukung pencapaiannya. Penetapan target kinerja untuk IKK mempertimbangkan ambisi strategis organisasi, sumber daya yang tersedia, serta analisis terhadap faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kinerja. IKK ini dipilih karena kemampuannya dalam memberikan gambaran ringkas namun komprehensif mengenai area-area kinerja yang paling menentukan keberhasilan Sekretariat DPRD.

Fokus Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Kota Bekasi ini mencakup aspek-aspek esensial dalam menjalankan fungsi dukungan terhadap DPRD. Hal ini meliputi efektivitas dalam memfasilitasi proses legislasi yang berkualitas, tingkat efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan administrasi, kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, serta tingkat kepuasan pemangku kepentingan utama, termasuk anggota DPRD dan Pemerintah Daerah. Pemantauan secara seksama terhadap tren dan pencapaian target IKK ini akan memberikan informasi penting bagi pimpinan Sekretariat DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Kunci ini, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki alat ukur strategis yang kuat untuk memantau kemajuan dalam mencapai tujuan-tujuan prioritasnya. IKK ini akan menjadi fokus utama dalam pelaporan kinerja dan akan digunakan sebagai dasar untuk dialog kinerja antara pimpinan dan staf. Melalui pengelolaan kinerja yang berorientasi pada IKK, diharapkan Sekretariat DPRD dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan dukungannya kepada DPRD, serta berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kota Bekasi secara keseluruhan.

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	50	50	50	50	50	50	Jumlah Perda yang disahkan/ Raperda yang diusulkan
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	80	80	80	80	80	80	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah / Kegiatan Pengawasan terhadap urusan Pemerintahan yang dilakukan oleh DPRD

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari rangkaian penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun [Sebutkan Tahun Periode Renstra, contoh: 2026-2031], yang secara fundamental berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025. Melalui serangkaian analisis mendalam, identifikasi isu strategis, perumusan visi dan misi, penetapan tujuan dan sasaran, hingga penjabaran strategi dan kebijakan, dokumen rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi kompas yang mengarahkan gerak langkah Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Implementasi rencana strategis ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi, serta dukungan penuh dari pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Sinergi dan kolaborasi yang harmonis antar bidang dan bagian dalam Sekretariat, serta dengan pihak-pihak eksternal terkait, menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan dibangun secara berkala akan menjadi instrumen penting dalam mengukur kinerja dan mengidentifikasi potensi kendala dalam pelaksanaan rencana strategis ini. Hasil monitoring dan evaluasi ini akan menjadi dasar bagi penyempurnaan dan penyesuaian rencana strategis di masa mendatang, sehingga Sekretariat DPRD Kota Bekasi dapat terus adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi ini, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan yang prima dalam mendukung fungsi-fungsi DPRD (legislasi, anggaran, dan pengawasan), serta peningkatan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Bekasi secara berkelanjutan. Dokumen ini bukan merupakan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari sebuah perjalanan dalam mewujudkan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

Keberhasilan implementasi rencana strategis ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari bergandengan tangan, dengan semangat pengabdian dan dedikasi, untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang telah kita cita-citakan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 26 Agustus 2025

Sekretaris DPRD Kota Bekasi


Lia Erliani, A.P., M.Si
NIP. 19750606 199311 2 001